

April 2019

Nomor : /TU.020/G.1/04/2019  
Hal : Laporan Evaluasi Kegiatan Penyiapan Bahan  
Pengelolaan Informasi Publik  
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

**Yth. Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Humas  
Jakarta**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 30/Permentan/OT.040/6/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal , berikut kami laporkan kegiatan Penyiapan Pengelolaan Informasi Publik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian .

**LAPORAN EVALUASI  
TENTANG  
PENYIAPAN BAHAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN**

**A. Pendahuluan**

**1. Umum**

Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka kita harus dapat meningkatkan pelayanan dalam bentuk informasi dan dokumentasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas mengenai apa yang menjadi kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian baik yang sudah ataupun yang sedang kita laksanakan. Saat ini kegiatan yang telah kita lakukan meliputi kegiatan bahan hukum dan literatur hukum serta peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk informasi publik yang harus diberikan dan disebarluaskan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui media elektronik

(website) atau lainnya sehingga Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mutlak adanya.

Kementerian Pertanian berkewajiban mempublikasikan informasi kepada publik untuk mendapat kepercayaan, komitmen dan partisipasi yang luas dalam keikutsertaanya untuk melaksanakan program-program pembangunan pertanian. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan integritas yang memiliki keterampilan dan keahlian serta sikap perilaku yang baik dalam menjalankan fungsi kehumasan secara proporsional dan professional.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Tujuan penyusunan kegiatan ini dimaksudkan sebagai bahan acuan untuk melaporkan kinerja penyiapan bahan pengelolaan informasi publik lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada bulan Februari 2019.

## **3. Ruang Lingkup**

Kegiatan penyiapan bahan Pengelolaan informasi publik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada bulan Februari 2019 sesuai dengan target realisasi kegiatan.

## **4. Dasar**

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30/Permentan/OT.040/6/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal.

## **B. Kegiatan yang dilaksanakan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30/Permentan/OT.040/6/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Inspektorat Jenderal, Subagian Hukum dan Humas antara lain mempunyai tugas dan fungsi : **Melakukan Penyiapan bahan Pengelolaan Informasi Publik.**

### C. Hasil yang dicapai

Dapat disampaikan tugas dan fungsi Subbagian Hukum dan Humas terkait kegiatan **Melakukan Penyiapan bahan Pengelolaan Informasi Publik** pada bulan Maret 2019 antara lain :

#### 1) Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut, setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada tanggal 13 Februari 2019, sesuai dengan Surat Tugas Nomor B.0100/TU.040/G.1/02/2019 telah melaksanakan pembahasan daftar informasi publik Itjentan tahun 2018. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pembahasan untuk penetapan daftar informasi publik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai dengan klasifikasi terbuka maupun tertutup.

#### 2) Pengelolaan LAPOR!

Sebagai bentuk sinergi Pemerintah untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan yang disampaikan tertangani dengan baik, Kementerian Pertanian terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yaitu melalui Aplikasi LAPOR!.

LAPOR! Dikembangkan oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP), dikelola oleh Kementerian PANRB, dan diawasi

oleh Ombudsman RI, Inspektorat Jenderal ditunjuk sebagai Pejabat penghubung LAPOR! Kementerian Pertanian.

Rekapitulasi pada bulan Februari 2019, belum dapat dilaporkan oleh admin karena terdapat kendala aplikasi yang error sehingga tidak dapat dibuka

### 3) Pengelolaan SMS Center

SMS Center merupakan fasilitas yang disediakan Kementerian Pertanian menggunakan media SMS agar masyarakat dapat memberikan masukan, pertanyaan, pengaduan dll, masyarakat dapat menggunakan fasilitas ini melalui SMS ke nomer 2106, masukan yang datanganya dari masyarakat wajib ditanggapi oleh Tim Penjawab yang sudah ditetapkan, sesuai bidang tanggungjawabnya (Per Eselon I), dan dalam melakukan tanggapan, Tim Penjawab menggunakan sistem khusus berbasis internet.

Pada bulan Maret 2019, tidak terdapat pengaduan melalui SMS Center.

### 4) Pengelolaan Perpustakaan

Dibuatnya desain perpustakaan mini yang dapat memberikan informasi terhadap buku-buku yang dibutuhkan pemohon informasi.

## D. Kesimpulan

Secara umum kegiatan Pengelolaan Informasi Publik pada Subbagian Hukum dan Humas terkait kegiatan melakukan **Melakukan Penyiapan Pengelolaan Informasi Publik** pada bulan Februari 2019 telah berjalan, namun harus dilakukan Koordinasi dengan UKP4 terkait Aplikasi LAPOR! Inspektorat Jenderal "Error".

## E. Penutup

Demikian laporan kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Bapak dan mohon arahan selanjutnya.

**Kepala Subbagian Hukum dan  
Humas**

**Eko Supriyanto, S.Sos**



**1. Kegiatan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pelaksanaan perpustakaan dan publikasi, sebagai berikut:**

2. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka menyediakan data perundang-undangan terkini bidang pembangunan pertanian bagi kepentingan aparat pengawas intern lingkup Kementerian Pertanian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara baik, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu menyusun produk hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan.

Pada bulan April 2019 telah tersusun 2 (dua) Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, antara lain :

- Nomor B-842/Kpts/OT.050/G/04/2019 tentang Tim Pendamping dan Pelaksana Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai Melalui Program
- Nomor B-11/Kpts/OT.050/G/01/2019 tentang Tim Penilaian Kembali Barang Milik Negara Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019

3. Pengembangan SDM

Pengembangan kapasitas manajemen SDM pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilaksanakan dengan maksud memberikan wadah/kegiatan SDM Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam menjaga kesehatan fisik/jasmani dan mental stakeholdernya. Sedangkan tujuannya adalah 1) Menjaga/meningkatkan kesehatan SDM Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian; 2) Membina mental SDM Inspektorat Jenderal;

3) Membina kesehatan jasmani anggota; dan 4) Meningkatkan wawasan SDM Inspektorat Jenderal.

Pada bulan Maret 2019, peningkatan kapasitas SDM antara lain :

- Pembinaan rohani melalui pengajian yang dilakukan setiap Jumat bertempat di Musholla Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan;
- Peningkatan jasmani melalui latihan futsal dan badminton yang dilaksanakan sekali seminggu.

4. Tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Atasan baik secara lisan maupun tertulis dengan peraturan yang berlaku agar tugas kedinasan lain dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan tahapan yang ada antara lain menelaah disposisi atau perintah atasan, mempelajari materi terkait pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas, menyiapkan data dan materi laporan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

Pada tanggal 26 April 2019, sesuai dengan Surat Tugas Nomor B.0318/TU.040/G.1/04/2019 telah menghadiri launching peta okupasi sektor pertanian di hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta.